



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Maret 2023/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK-RI)
UNIT KERJA : BPK PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : CAHYO UTOMO
2. Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
3. NHK : 54451

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 1.570.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/36 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
2. Tanah Seluas 2250 m2 di KAB / KOTA MADIUN, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
3. Tanah Seluas 2100 m2 di KAB / KOTA MADIUN, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 937 m2/184 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, WARISAN Rp. 140.000.000
5. Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, WARISAN Rp. 160.000.000
6. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m2/65 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 268.500.000

1. MOTOR, SUZUKI FD 110 BEBEK Tahun 2000, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
2. MOTOR, HONDA BEBEK Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
3. MOBIL, SUZUKI SWIFT Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000
4. MOTOR, BSA C12 Tahun 1956, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
5. MOTOR, VESPA CORSA Tahun 1986, HASIL SENDIRI Rp.



31.000.000

6. MOTOR, HONDA CB 125 SE Tahun 1974, HASIL SENDIRI Rp.

16.500.000

7. MOTOR, SUZUKI A100 A3 Tahun 1973, HASIL SENDIRI Rp.

11.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **144.000.000****D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. **755.938.536****F. HARTA LAINNYA** Rp. ----**Sub Total** Rp. **2.738.438.536****III. HUTANG** Rp. ----**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. **2.738.438.536**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.